

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan langit dan bumi untuk manusia diamanatkan kepada manusia sebagai *khalifah* di muka bumi, tanah yang merupakan salah satu bagian dari bumi mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan manusia. Bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah, tidak hanya pada masa hidupnya tetapi sudah meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu tanah merupakan suatu kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan dunia ini.¹

Negara Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim disamping menjalankan hukum positif peninggalan Belanda juga menggunakan hukum Islam dalam menentukan hukum sehari-hari, khususnya masalah perwakafan. Sejak Islam datang di wilayah nusantara wakaf telah menjadi bagian dari praktik keberagaman umat Islam dan telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut sebagian besar dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu paham *syafi'iyah*.²

Wakaf adalah suatu lembaga yang potensial dalam mengembangkan agama dan merupakan sarana untuk membangun umat. Terutama dalam bidang mental spiritual menuju pembangun manusia seutuhnya. Di sisi lain lembaga wakaf merupakan sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan

¹Mudjiono. *Politik Dan Hukum Agraria*. Yogyakarta: Liberty. 1977, hal 35.

²Depag RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji. 2003, hal 16.

manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Rasulullah Saw bersabda: *“Barang siapa yang mewakafkan sesuatu yang dapat memberi mudharat kepada warisnya, maka wakafnya menjadi batal, karena Allah SWT tidak mengizinkan hal seperti itu. Dan semua wakaf yang dimaksudkan untuk menghentikan perintah Allah dan menghasilkan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban-kewajiban dari Allah Azza wajalla, maka wakaf itu batal.”*³

Sekarang ini masih banyak tanah wakaf yang belum dikelola secara efektif sebagaimana mestinya sesuai dengan perkembangan masa derap langkah pembangunan. Dalam undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan tanah benda wakaf sesuai dengan fungsinya, serta wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi tanah benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan dasar tanah wakaf adalah untuk diambil manfaatnya sebanyak mungkin untuk jalan yang diridhoi Allah SWT dan kemaslahatan umat. Tetapi pada kenyataannya, pengelolaan tanah wakaf belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan wakaf.⁴

Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan hukum-hukum yang menyangkut dengan wakaf, disamping kurangnya perhatian dari pemuka agama dan pemerintah sendiri dalam pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf. Tetapi sebenarnya berkembang tidaknya tanah

³Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.2002, hlm. 32

⁴Undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, departemen agama RI, direktorat jendral bimas Islam dan penyelenggara haji, hlm. 5.

wakaf, salah satunya banyak banyak tergantung pada *Naẓīr* (pengelola), baik yang dikelola secara perorangan, organisasi, ataupun badan hukum. Walaupun *mujtahid* tidak menjadikan *Naẓīr* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wakif* (orang yang mewakafkan tanahnya) harus menunjuk *Naẓīr* wakaf. Dalam undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pun, *Naẓīr* merupakan unsur yang harus ada dalam masalah wakaf. Hal ini mengingat pentingnya keberadaan *Naẓīr* agar tanah wakaf itu harus tetap terjaga dan terpelihara sehingga tanah wakaf itu tidak sia-sia dan dapat dikembangkan secara terus-menerus.

Tugas *Naẓīr* selain bertugas melakukan pengadministrasian tanah benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia, *Naẓīr* juga bertugas untuk mengelola dan mengembangkan tanah benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya serta mengawasi dan melandasi tanah benda wakaf yang dikelolanya.⁵

Melihat tugas tersebut, maka jelaslah bahwa, berfungsi atau tidaknya suatu lembaga perwakafan tergantung pada *Naẓīr*nya. Masalah *Naẓīr* sebagai orang yang mengurus tanah wakaf sangat penting diperhatikan, mengingat banyaknya terjadi sengketa terhadap tanah wakaf, semisal diselewengkan tanah tersebut bahkan ada yang diwariskan. Potensi wakaf di Indonesia yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pengelolaannya masih bersifat konsumtif dan kelola secara produktif dan dinamis. Lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan

⁵Undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. hlm. 9.

masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan hanya untuk rumah-rumah ibadah seperti masjid, musala atau lembaga Islam lainnya. Begitu pula pondok pesantren yang dibangun diatas tanah wakaf yang berada di Indonesia. Sedikit sekali tanah wakaf khususnya pondok pesantren yang dikelola secara produktif.

Pondok Pesantren Muhammadiyah Ulil Albab 2 Ngawi adalah salah satu lembaga pendidikan pesantren di bawah pengawasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ngawi. Penyelenggaraan pendidikan dalam pesantren ini sudah berjalan enam tahun terhitung dari tahun 2012. Pimpinan daerah Muhammadiyah Ngawi mendirikan pesantren ini setelah sebelumnya mendapatkan tanah wakaf dari yayasan Iman Taberi. Pemanfaatan tanah wakaf ini oleh *Naẓīr* secara garis besar dimanfaatkan dalam bidang pendidikan.⁶ Berangkat dari temuan pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf yang berada di Ngawi ini maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan fokus permasalahan bagaimana peran *Naẓīr* dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Muhammadiyah Ulil Albab 2 Ngawi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai: bagaimana peran *Naẓīr* dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf yang berada di Pondok Pesantren Muhammadiyah Ulil Albab 2 Ngawi?

⁶ Wawancara dengan Sumarno pada tanggal 8 Januari 2016, pukul 09.00-10.00 WIB.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *Naẓīr* dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf yang berada di Pondok Pesantren Muhammadiyah Ulil Albab 2 Ngawi.

2. Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai kontribusi pemikiran bagi lembaga dalam pengelolaan tanah wakaf, bahan kajian bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang pengelolaan dan pengelolaan tanah wakaf.
- b. Manfaat Praktis: hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada para *Naẓīr* mengenai pengelolaan tanah wakaf di Pondok pesantren Muhammadiyah Ulil Albab 2 Ngawi